

PENGARUH PAD DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DAN IPM DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

I Putu Gede France Sugion ¹

Ida Bagus Putu Purbadharmaja ²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah daerah yang telah dikeluarkan diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di setiap daerahnya, misalnya dalam memanfaatkan PAD yang digunakan sebagai belanja modal yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat. Tujuan penelitian yaitu, (1) untuk menganalisis pengaruh langsung PAD, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. (2) untuk menganalisis pengaruh langsung PAD, Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. (3) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung PAD dan Belanja Modal terhadap IPM melalui Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Teknik analisis menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal secara langsung berpengaruh negatif (signifikan) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. (2) Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan tingkat kemiskinan secara langsung berpengaruh negatif (signifikan) terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali. (3) Pendapatan asli daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Kata kunci : *pendapatan asli daerah, belanja modal, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia.*

ABSTRACT

The regional government policies have issued expected able to overcome ongoing problems, they can improve standard of living of people, for example utilizing PAD used as capital expenditure which is expected to provide long-term benefits for the community. The research objectives were to analyze (1) effect PAD and capital expenditures on poverty levels regencies / cities Bali province. (2) effect PAD, Capital Expenditures and Poverty Levels on IPM Regency / City Bali Province. (3) PAD and Capital Expenditures on the IPM through the Poverty Level Regency / City Bali Province. Analysis technique uses path analysis. Results of the study are (1) local revenue and capital expenditure directly have a negative (significant) effect on poverty levels in the regencies / cities of Bali Province. (2) Local original income and capital expenditure do not directly have a significant effect on the human development index, while the poverty level directly has a negative (significant) effect on the human development index in the regencies / cities of Bali Province. (3) Local revenue and capital expenditure indirectly affect the Human Development Index through the Poverty Level in the Regency / City of Bali Province.

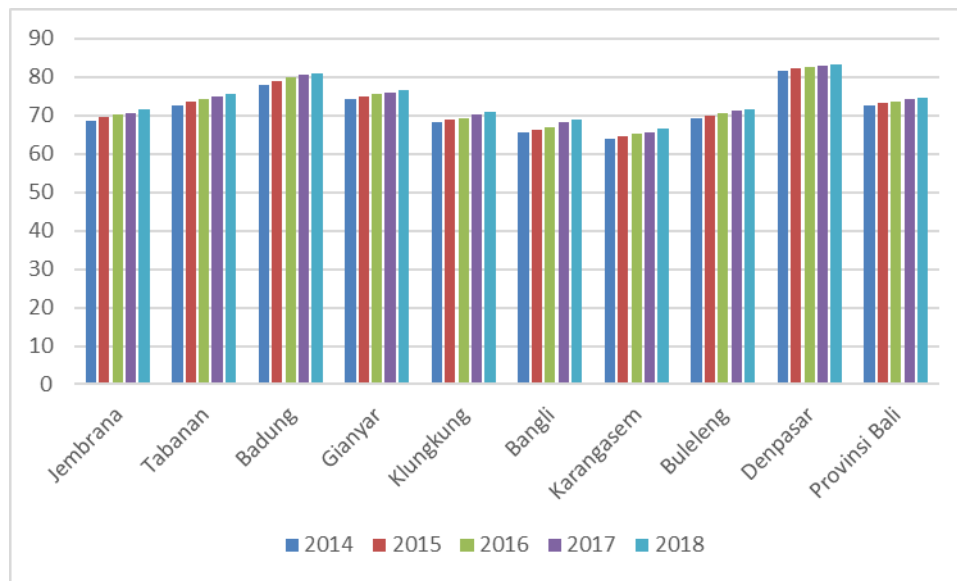
Key words: local revenue, capital expenditure, poverty rate, human development index.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang. Raden Pardede dan Shirin Zahro (2017) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Artana Yasa (2015) berpendapat bahwa pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan agar memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan agar tercipta suatu kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah sangat diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang sedang terjadi seperti mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, pendidikan yang sangat rendah serta ketimpangan lainnya antar kabupaten/kota sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat (Rosita, 2016). Ketimpangan serta kesenjangan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh sumber daya manusia, perubahan demografi, pengangguran, dan migrasi sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi tidak merata (Silvia dan Sumarto, 2014). Pembiayaan yang diberikan oleh pemerintah dapat membantu proses pertumbuhan sehingga pemerintah berperan sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Dalamagas, 2010).

Selama ini pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Pola pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat dapat menimbulkan penurunan angka kesejahteraan masyarakat yang dapat dipantau dengan melihat tinggi rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data BPS tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali terus mengalami peningkatan. Nilai IPM Provinsi Bali pada tahun 2018 sebesar 74,77 dan berada diatas nilai IPM Nasional sebesar 71,39. Meskipun terus mengalami peningkatan dan kini berada pada lima besar nasional, IPM Provinsi Bali masih mengalami disparitas antar daerahnya. IPM Provinsi Bali seharusnya bisa berada di peringkat atas jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini terkait dengan Provinsi Bali yang merupakan daerah pariwisata dan merupakan salah satu destinasi pariwisata dunia (Ndakularak, 2014). Dalam penelitian Bendesa dan Sukarsa (1980) menyatakan, Provinsi Bali merupakan daerah yang terkenal dengan daerah penghasil padi, namun satu dekade lalu industri pariwisata merupakan sumber penerimaan terbesar yang diterima oleh Provinsi Bali. Grafik 1.1 merupakan angka IPM Provinsi Bali pada tahun 2014 – 2018.



Gambar 1 Tingkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali(Poin)

Sumber : BPS, Provinsi Bali. 2018

Berdasarkan Grafik 1, dapat terlihat bahwa telah terjadi peningkatan angka IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali. Meskipun angka IPM cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi pertumbuhan IPM masih mengalami fluktuasi selama periode 2014-2018. Nilai IPM yang terendah terdapat pada tahun 2014 di Kabupaten Karangasem sebesar 64,01. Sedangkan IPM tertinggi terdapat pada Kota Denpasar sebesar 83,3 pada tahun 2018. Hal ini merupakan sebuah ketimpangan dalam pencapaian IPM antar kabupaten/kota di Provinsi Bali karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia juga sarana prasarana di bidang pendidikan, kesehatan maupun yang lain sebagai indikator IPM. IPM menjadi sangat penting, strategis dan dibutuhkan oleh banyak kalangan, terutama pemerintah, sebagai bahan rujukan dalam mengambil berbagai kebijakan pemerintah. Selain itu, IPM juga

digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah.

Penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian utama pembangunan nasional dan daerah, terutama sejak diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan daerah. Hal tersebut seharusnya dijadikan momentum dan peluang untuk mewujudkan desentralisasi pembangunan yang sensitif terhadap persoalan lokal. Berarti memecahkan masalah kemiskinan secara tidak langsung memecahkan banyak persoalan sosial yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

Kemiskinan merupakan konsep multi dimensi tentang kesejahteraan manusia yang meliputi berbagai ukuran tradisional tentang kemakmuran misalnya pendapatan, kesehatan, dan keamanan. Disisi lain jebakan kemiskinan yang membelenggu penduduk miskin sebagai akar segala ketidakberdayaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia, sehingga isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam *Millenium Development Goals* (MDG's) yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 2000, namun keberlanjutan program MDG's di bahas kembali pada era *Sustainable Development Goals* (SDG's). Salah satunya himbauan dari PBB yang mengharapkan seluruh negara yang menjadi anggotanya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan kekurangan pangan dimasing-masing negara hingga 50 persen pada tahun 2015 (Swara, 2012).

Kemiskinan adalah sebuah kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan

kesehatan. Adapun persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali periode 2014 – 2018 adalah sebagai berikut

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Periode 2014-2018

| Kabupaten/Kota | Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Jembrana | 5.83 | 5.84 | 5.33 | 5.38 | 5.2 |
| Tabanan | 5.61 | 5.52 | 5 | 4.92 | 4.46 |
| Badung | 2.54 | 2.33 | 2.06 | 2.06 | 1.98 |
| Gianyar | 4.57 | 4.61 | 4.44 | 4.46 | 4.19 |
| Klungkung | 7.01 | 6.91 | 6.35 | 6.29 | 5.86 |
| Bangli | 5.86 | 5.73 | 5.22 | 5.23 | 4.89 |
| Karangasem | 7.3 | 7.44 | 6.61 | 6.55 | 6.28 |
| Buleleng | 6.79 | 6.74 | 5.79 | 5.74 | 5.36 |
| Denpasar | 2.21 | 2.39 | 2.15 | 2.27 | 2.24 |
| Provinsi Bali | 4.76 | 4.74 | 4.25 | 4.25 | 4.01 |

Sumber : BPS, Provinsi Bali 2019

Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali mengalami penurunan setiap tahunnya dengan angka yang berfluktuasi. Namun, pada kenyataannya meskipun bila dilihat kembali pada tingkat IPM yang meningkat dan penurunan pada tingkat kemiskinan, masih banyak jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Provinsi Bali. Kenyataan ini patut menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam menilai kinerja perekonomian provinsi-provinsi di Indonesia. Sehingga belum adanya pemerataan kesejahteraan antar daerah di Indonesia. Kondisi ini terjadi akibat adanya dominasi perekonomian oleh provinsi-provinsi tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang mendalam akan penyebab tingginya tingkat kemiskinan di

sebagian besar propinsi di Indonesia, sehingga nantinya diharapkan dapat memecahkan permasalahan kemiskinan di Indonesia sesuai dengan kondisi masing-masing provinsi (Samputra, 2019).

Dalam menelaah kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan, perlu terlebih dahulu diperhatikan faktor-faktor penyebab kemiskinan atau dalam analisis kemiskinan disebut determinan kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada program pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan tersebut. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektor, komunitas, rumah tangga, dan individu (World Bank, 2002). Pemerintah daerah selama ini telah memberikan perhatian yang sangat besar pada masalah pengentasan kemiskinan ini dengan melakukan program-program pembangunan yang bersifat pro-poor, namun demikian, kemiskinan tetap masih menjadi masalah yang berkepanjangan sampai saat ini (Sri Budhi, 2019). Untuk menjawab semua permasalahan kemiskinan, maka pemerintah menyasar desa dengan tingkat kemiskinan tinggi untuk diberikan program pengentasan kemiskinan. Kebijakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi kemiskinan masih dipertanyakan, sebab sulit untuk dievaluasi dampaknya karena kebijakan banyak mengalami penundaan implementasi dan hasil (Dartanto dan Nurkholis, 2013).

Pemerintah Daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri berupa PAD, pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemda (Kuncoro, 2004).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004).

Pendapatan Asli Daerah yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berbeda pula, sehingga mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang tidak sama antara daerah satu dengan daerah lainnya. Idealnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai anggaran daerah, karena kemampuan atau kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD akan menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, diklasifikasikan dalam 3 sumber, yaitu: PAD (Pendapatan Asli Daerah); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Penerimaan yang sah. Khusus mengenai PAD dapat dikatakan bahwa peranannya/sumbangannya terhadap keseluruhan APBD masih relatif kecil.

Potensi PAD masing-masing daerah sangat jauh berbeda, sehingga menimbulkan terjadinya *fiscal gap*. *Fiscal gap* terjadi karena karakteristik daerah di Indonesia sangat beraneka ragam, ada daerah yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, ada juga daerah yang tidak memiliki kekayaan alam yang besar tetapi karena struktur ekonomi yang telah tertata dengan baik, maka potensi pajak

dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi kaya, dalam artian PAD tinggi. Di sisi lain ada juga daerah yang secara alamiah maupun struktur ekonomi masih sangat tertinggal (Caraka, 2019).

Perkembangan penerimaan daerah provinsi Bali dapat dilihat pada data bps provinsi bali, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa penggalan dana oleh pemerintah daerah propinsi melalui sumber daya asli daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Meningkatnya PAD diharapkan dapat menjadi sinyal bagi kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi jumlah masyarakat miskin, setiap negara berupaya melakukan pembangunan. Dampak pertumbuhan terhadap pengentasan kemiskinan melemah akhir – akhir ini karena semakin meningkatnya ketimpangan pendapatan (Nehru, 2013). Salah satu sasaran dari pembangunan adalah memperbaiki kondisi ekonomi suatu masyarakat menjadi lebih baik agar jumlah masyarakat miskin dapat berkurang. Kemampuan pemerintah dalam mengurangi jumlah masyarakat miskin dalam suatu negara dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan. Sebaliknya angka kemiskinan yang tinggi dapat mengurangi prestasi pemerintah dalam kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan yang tidak mengubah kondisi kemiskinan akan menyisakan masalah yang memicu permasalahan sosial dan politik. Stabilitas negara akan terganggu dan biasanya secara simultan akan berbalik mengganggu kinerja perekonomian yang sedang dibangun. Karena itu, masalah kemiskinan telah

menjadi agenda bersama setiap negara yang tergabung dalam membangun komitmen tujuan pembangunan millenium (Sundaya, 2008).

Belanja modal pemerintah secara umum dialokasikan untuk kepentingan publik dalam mengentaskan kemiskinan melalui pembuatan infrastruktur yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Yustie dan Hariqbaldi (2014) dan Kotambunan (2016), bahwa belanja modal memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengaruh belanja modal terhadap kemiskinan menurut penelitian yang dilakukan oleh (Widianto, dkk 2016) menemukan bahwa kedua variabel tersebut memiliki korelasi yang negatif.

Salah satu peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mengefektifkan belanja pemerintah daerah dalam menunjang aktifitas perekonomian masyarakat seperti pembangunan sarana umum, selain itu dengan pengalokasian yang tepat pada belanja pemerintah maka diharapkan pendapatan daerah juga akan meningkat (Kusuma, 2016). Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dalam membuka lapangan kerja. Hal tersebut dapat memperbesar penyerapan tenaga kerja, yang berarti pengangguran akan menurun dan diperolehnya penghasilan, yang pada akhirnya akan menuju pada perbaikan kesejahteraan masyarakat (Santi, 2016). Akonji et al. (2013) yang menyatakan belanja publik sebagian besar dikendalikan oleh tingkat pertumbuhan

ekonomi. Salih (2012), menambahkan bahwa pengeluaran publik harus digunakan tepat sasaran misalnya dalam pembukaan lapangan kerja. Lapangan kerja yang banyak nantinya diharapkan dapat menyerap pengangguran yang ada.

Hal senada juga disampaikan oleh Yunan (2011), dimana dalam melaksanakan pembangunan daerah perlu dilakukan perencanaan dan strategi yang sesuai, karena setiap daerah memiliki karakteristik, kondisi, dan potensi yang berbeda-beda, sehingga penentuan sektor potensial perlu dilakukan. Menurut Butnaru dan Minut (2012), pembangunan yang berdasarkan strategi atau perencanaan akan menghasilkan pembangunan yang lebih baik, dan diperlukan pula kebijakan yang sesuai untuk mendukung strategi tersebut. Menurut Goonerwardena (2003), bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan karena hal tersebut akan berkaitan dengan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang.

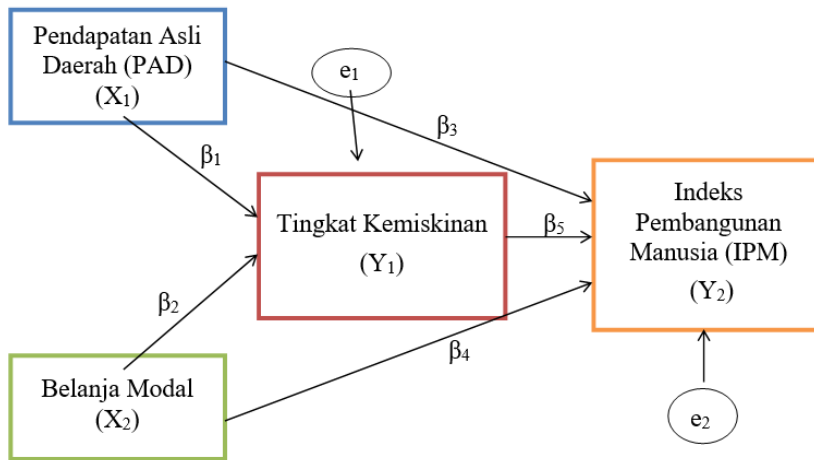
Program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Bali tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Kemampuan pemerintah dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sebaliknya program pembangunan dapat dikatakan mengalami kegagalan apabila tidak mampu mengurangi jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut; 1) Untuk menganalisis pengaruh langsung pendapatan asli daerah (PAD), dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota

Provinsi Bali. 2) Untuk menganalisis pengaruh langsung pendapatan asli daerah (PAD), Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. 3) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivis, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Bali yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem dan Kota Denpasar. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian antara Kabupaten/Kota dikarenakan penulis melihat masih terjadinya tingkat kemiskinan dan masih terjadinya ketimpangan indeks pembangunan manusia antar Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik analisis jalur (*path analysis*). Hubungan variabel tersebut di jelaskan melalui kerangka konseptual yang ada.



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Tingkat Kemiskinan

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X2 = Belanja Modal

Y1 = Tingkat Kemiskinan

Y2 = Indeks Pembangunan Manusia

e1,e2 = nilai kekeliruan taksiran standar

b1...b5 = koefisien jalur masing-masing variabel

Nilai kekeliruan taksiran standar (*standar error of estimate*), yaitu

$$e_i = \sqrt{1 - R_i^2} \dots\dots\dots(3)$$

Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan :

$$R^2_m = 1 - (e_1^2 e_2^2 \dots e_p^2) \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan : e_i adalah *standard error of estimate*
 R²m adalah koefisien determinasi total

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Koefisien jalur pada penelitian ini diperoleh dari hasil perhitungan dengan metode regresi (*Ordinary Least Square-OLS*) menggunakan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 22. Hasil analisis dapat ditunjukkan seperti pada persamaan struktural sebagai berikut.

1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan

Pengujian pertama dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan secara langsung yang dilakukan dengan program *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 22 maka hasil analisis regresi disajikan dalam (Lampiran 2).

Tabel 2. Hasil *Coefficients* Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan

| Model | Coefficients ^a | | | | | |
|-------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|--------|------|
| | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | |
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| 1 | (Constant) | 3.894 | .325 | | 11.972 | .000 |
| | Pendapatan Asli Daerah | -.183 | .044 | -.515 | -4.151 | .000 |
| | Belanja Modal | -.239 | .080 | -.369 | -2.977 | .005 |

a. Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan

Sumber: *Lampiran 2*

Berdasarkan hasil Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel PAD terhadap tingkat kemiskinan dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa PAD berpengaruh secara langsung negatif signifikan

terhadap tingkat kemiskinan, hal ini berarti setiap kenaikan satu rupiah pada PAD menyebabkan penurunan satu persen pada tingkat kemiskinan. Hasil pengujian variabel belanja modal terhadap tingkat kemiskinan yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh secara langsung negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, hal ini berarti setiap kenaikan satu rupiah belanja modal menyebabkan penurunan satu persen pada tingkat kemiskinan. Hasil analisis menunjukkan model persamaan struktural 1 dapat disajikan sebagai berikut.

$$\hat{Y}_1 = -0.515 X_1 - 0.369 X_2 + 0.578 \dots \dots \dots (6)$$

Keterangan:

X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_2 = Belanja Modal

Y_1 = Tingkat Kemiskinan

e_1, e_2 = nilai kekeliruan taksiran standar

$b_1 \dots b_5$ = koefisien jalur masing-masing variabel

Persamaan diatas merupakan pengaruh dari variabel PAD dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan, dimana pada koefisien variabel PAD yaitu sebesar $-0,515$ berarti bahwa setiap peningkatan 1 rupiah PAD akan menurunkan 0,515 tingkat kemiskinan. Koefisien variabel belanja modal yaitu sebesar $-0,369$, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 rupiah pada pengeluaran belanja modal akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,369.

2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Pengujian persamaan 2 dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia secara langsung yang dilakukan dengan program *Statistical (Product and Service Solutions) SPSS* versi 22 maka hasil uji regresi disajikan dalam (Lampiran 3).

Tabel 3 Hasil *Coefficients* Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

| Model | | Coefficients ^a | | | t | Sig. |
|----------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 4.534 | .089 | | 51.191 | .000 |
| | Pendapatan Asli Daerah | .010 | .007 | .153 | 1.445 | .156 |
| | Belanja Modal | -.012 | .011 | -.105 | -1.076 | .288 |
| | Tingkat Kemiskinan | -.157 | .020 | -.866 | -7.831 | .000 |

a. Dependent Variable: Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: *Lampiran 3*

Berdasarkan hasil Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil pengujian variabel PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan signifikansi sebesar $0,156 > 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa PAD tidak berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil pengujian variabel belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,288 > 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil pengujian variabel tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang memiliki nilai signifikansi

sebesar $0,000 < 0,05$ (nilai alpha), maka hal ini membuktikan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh secara langsung negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini berarti setiap kenaikan satu persen tingkat kemiskinan menyebabkan penurunan satu poin terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil pengujian menunjukkan model persamaan struktural 2 dapat disajikan sebagai berikut

$$\hat{Y}_2 = 0.153 X_1 - 0.105 X_2 - 0.866 Y_1 + 0.408 \dots \dots \dots (7)$$

Persamaan diatas merupakan pengaruh dari variabel PAD, belanja modal dan tingkat kemiskinan terhadap IPM dimana pada koefisien variabel PAD yaitu sebesar 0.153 berarti bahwa setiap peningkatan 1 rupiah PAD akan meningkatkan IPM sebesar 0.153. Koefisien variabel belanja modal yaitu sebesar - 0.105, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 rupiah pada pengeluaran belanja modal akan menurunkan IPM sebesar 0.105. Koefisien variabel Tingkat Kemiskinan yaitu sebesar - 0.866, yang berarti bahwa setiap peningkatan 1 persen pada Tingkat Kemiskinan akan menurunkan IPM sebesar 0. 866.

Keterangan :

- X_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X_2 = Belanja Modal
- Y_1 = Tingkat Kemiskinan
- Y_2 = Indeks Pembangunan Manusia
- e_1, e_2 = nilai kekeliruan taksiran standar
- $b_1 \dots b_5$ = koefisien jalur masing-masing variabel

Nilai Kekeliruan Taksiran Standar

Mengetahui nilai e_1 yang menunjukkan jumlah varian variabel Tingkat Kemiskinan yang tidak dijelaskan oleh Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal dihitung dengan menggunakan rumus:

$$e_1 = \sqrt{1 - R_1^2}$$

$$e_1 = \sqrt{1 - 0.666} = 0.578$$

Hal ini berarti nilai e_1 sebesar 0,578 yaitu 57,8% dalam variabel tingkat kemiskinan tidak dapat dijelaskan dengan Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal, sedangkan sisanya 42,2% dapat dijelaskan dengan Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal.

Sedangkan untuk mengetahui nilai e_2 yang menunjukkan varian variabel Indeks Pembangunan Manusia yang tidak dijelaskan oleh variabel tingkat pendapatan asli daerah,, belanja modal, dan tingkat kemiskinan maka dihitung menggunakan rumus:

$$e_2 = \sqrt{1 - R_2^2}$$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0.833} = 0.408$$

Hal ini berarti nilai e_2 sebesar 0,408 yaitu 40,8% dalam variabel Indeks Pembangunan Manusia tidak dapat dijelaskan dengan Pendapatan Asli Daerah, belanja modal, dan tingkat kemiskinan, sedangkan sisanya 59,2% dapat dijelaskan dengan Pendapatan Asli Daerah, belanja modal, dan tingkat kemiskinan.

Pemeriksaan Validitas Model

Memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut:

$$R^2_m = 1 - (Pe_1)^2 - (Pe_2)^2$$

$$= 1 - (0.578)^2 (0.408)^2$$
$$= 0.94$$

Keterangan:

R^2_m : Koefisien determinasi total

e_1, e_2 : Nilai kekeliruan taksiran standar

Dari hasil perhitungan koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 94 persen atau dengan kata lain informasi yang terkandung dalam data sebesar 94 persen dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Pengaruh Lnagung Variabel

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X_1) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_1) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar -0.515 dan nilai *probabilitas* sebesar $0.000 < 0,05$ berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hubungan negatif pada hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya pendapatan asli daerah maka tingkat kemiskinan semakin menurun.

Selama lima tahun kebelakang yang digunakan untuk menganalisis hal tersebut, menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah memang terjadi pada setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali. Hal ini dibarengi dengan penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi di setiap kabupaten/kotanya juga,

penurunan ini merupakan salah satu tingkat keberhasilan pemerintah daerahnya dalam mengalokasikan pendapatan yang ada pada sector yang potensial pada daerah tersebut, sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat di daerah itu sendiri.

Hubungan signifikan negatif antara variabel pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan yang didapat dalam penelitian sesuai dengan kajian yang dibuat oleh Santosa (2013) yang menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah dikabupaten/kota di Provinsi Bali pada penelitian ini membuktikan Meningkatnya pendapatan asli daerah akan dapat menurunkan kemiskinan. Daerah sudah mampu mendistribusikan potensi daerah dengan baik sehingga jumlah penduduk miskin semakin menurun (Arini, 2015).

Pengaruh Belanja Modal (X_2) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y_1) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai standardized coefficient beta sebesar -0.369 dan nilai probabilitas $0.005 < 0.05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya belanja modal maka tingkat kemiskinan semakin menurun.

Hubungan negatif antara variabel belanja modal terhadap tingkat kemiskinan dalam penelitian ini sesuai dengan realisasi anggaran pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang meningkat, membuat belanja modal ikut meningkat sehingga meningkatnya belanja modal tersebut berimbas pada menurunnya tingkat

kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Dengan terbukti adanya pengaruh signifikan negatif dari belanja modal terhadap kemiskinan pada penelitian ini, maka jelas bahwa belanja modal daerah sendiri terbukti konsisten dengan teori yang ada dan berperan penting sebagai lokomotif percepatan dan akselerasi pembangunan aktivitas ekonomi masyarakat di setiap provinsi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Adi (2012) yang memperoleh hasil bahwa rasio belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap kemiskinan di kota/kabupaten Jawa Timur. Pengaruh signifikan negatif dari belanja modal daerah terhadap tingkat kemiskinan juga berbanding lurus dengan teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave, berdasarkan pandangan mereka melalui pengamatan terhadap tahap-tahap pembangunan ekonomi di beberapa negara.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X₁) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y₂) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0.153 dan nilai probabilitas $0.156 > 0.05$ ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin meningkatnya pendapatan asli daerah maka indeks pembangunan manusia semakin meningkat.

Berdasarkan hasil olah data ditemukan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Pengalokasian PAD seharusnya digunakan untuk belanja modal seperti

pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan potensi wilayah sehingga komponen dalam IPM dapat ditingkatkan. Pembangunan yang dilakukan di setiap wilayah masih berorientasi pada pembangunan jangka panjang, misalnya seperti perbaikan jalan penghubung antar wilayah, yang memang nantinya dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pengembangan daerah, namun belum memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat yang ada sehingga pengeluaran yang dilakukan belum dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya meski tingkat kemiskinan mulai berkurang.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Sari dan Supadmi (2016), serta Putra dan Ulupui (2015) yang menyatakan bahwa meningkatnya PAD memungkinkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM jika dana tersebut dialokasikan tepat sasaran. PAD mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dimana komponen kesejahteraan dalam penelitian ini diukur dengan IPM adapun komponennya yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). PAD yang merupakan pendapatan daerah yang menjadi dana pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan belanja daerah untuk meraih kesejahteraan.

Belanja Modal (X₂) terhadap Indeka Pembangunan Manusia (Y₂) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar - 0.105 dan nilai probabilitas $0.288 > 0.05$ ini berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak,

artinya belanja modal tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin besar belanja modal yang dikeluarkan maka indeks pembangunan manusia semakin menurun.

Berdasarkan hasil olah data ditemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian ini bertentangan dengan hasil yang diperoleh Setyowati dan Suparwati (2012), dan Mirza (2011) menemukan pengaruh positif dan signifikan belanja modal terhadap peningkatan IPM.

Hal ini disebabkan pengalokasian belanja modal yang ada selama lima tahun terakhir tidak secara langsung memberikan dampak terhadap masyarakat di setiap daerahnya. Pengalokasian belanja modal yang ada lebih ditujukan untuk pembangunan jangka panjang seperti pembangunan akses antar daerah, pembangunan lapangan kerja yang manfaatnya lebih dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Sama seperti pengalokasian PAD yang ada masih diorientasikan pada pembangunan jangka panjang, sehingga belum berdampak langsung terhadap masyarakat di daerah tersebut.

Pengaruh Tingkat Kemiskinan (Y_1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y_2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar - 0.866 dan nilai probabilitas $0.000 < 0.05$ ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin

meningkatnya tingkat kemiskinan maka indeks pembangunan manusia semakin menurun.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kemiskinan yang meningkat memang ada namun sebagian besar sudah mengalami penurunan. Bila dilihat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut yang diukur melalui IPM, maka tingkat kesejahteraannya pun mengalami peningkatan. Kebijakan- kebijakan yang sudah di terapkan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini sudah membuahkan hasil yang baik, namun memang perlu adanya pemerataan kembali sehingga nantinya tidak terjadi ketimpangan untuk jangka panjang.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian sebelumnya oleh Hardanti (2008) melakukan penelitian tentang indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara indeks pembangunan manusia (IPM) dan kemiskinan, serta terdapat hubungan yang signifikan antara daya beli dan kemiskinan, apabila kemiskinan dihitung dari presentase penduduk miskin Provinsi terhadap total penduduk tiap provinsi di Indonesia (Nedo, 2016).

Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y2) melalui Tingkat Kemiskinan (Y1).

Oleh karena z hitung sebesar 3,67 lebih besar dari 1,96 berarti Tingkat Kemiskinan merupakan variabel intervening Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali atau dengan

kata lain Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Tingkat Kemiskinan.

Pengaruh tidak langsung Belanja Modal (X2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y2) melalui Tingkat Kemiskinan (Y1).

Oleh karena z hitung sebesar 2,79 lebih besar dari 1,96 berarti Tingkat Kemiskinan variabel intervening Belanja Modal (X2) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Y2) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali atau dengan kata lain Belanja Modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Tingkat

SIMPULAN

- 1) Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal secara langsung berpengaruh negatif (signifikan) terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hal ini berarti peningkatan yang terjadi pada PAD dan belanja modal dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi.
- 2) Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, sedangkan tingkat kemiskinan secara langsung berpengaruh negatif (signifikan) terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hal ini berarti peningkatan yang terjadi pada PAD dan Belanja Modal tidak mempengaruhi peningkatan pada IPM, sedangkan penurunan yang terjadi pada tingkat kemiskinan mempengaruhi peningkatan IPM.
- 3) Pendapatan asli daerah dan Belanja Modal berpengaruh secara tidak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Tingkat Kemiskinan di

Kabupaten/Kota Provinsi Bali, dimana variabel tingkat kemiskinan memediasi secara penuh variabel pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaruh secara langsung variabel PAD dan belanja modal terhadap IPM, sehingga pada pengaruh tidak langsung variabel tingkat kemiskinan memediasi secara penuh pengaruh variabel PAD dan Belanja modal terhadap IPM.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Bali disarankan untuk mengadakan program-program pengentasan kemiskinan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung pada saat itu juga kepada masyarakat yang kurang mampu dengan harapan masyarakat yang diberikan bantuan pun tepat sasaran melalui pendataan di setiap daerahnya,
- 2) Bagi masyarakat juga diharapkan untuk tidak hanya menunggu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, namun perlu juga adanya usaha dari setiap masyarakat sendiri sehingga dapat tercapai peningkatan taraf pendapatan keluarga salah satunya dengan cara tetap memberikan penghasilan dalam keluarga misalnya melakukan usaha rumahan, yang nantinya diharapkan dapat berpengaruh pada pengurangan kemiskinan di setiap daerahnya.

REFERENSI

Akonji, D. A., Olubukola, O. A., and Wakilia, A. M. 2013. Nexus Between Publik Expenditure and Economic Growth By Testing Wagner's Law Time Series: Evidence From Nigeria. *International Journal of Development and Sustainability*. 2(4). Hal: 2383-2395.

- Amalia, Firda Rizky dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Ddan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal EP Unud*, 3 [6] : 257-264 ISSN: 2303-0178.
- Artana Yasa, I Komang Oka; Arka, Sudarsana. 2015. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186. Available at: . Date accessed: 11 sep. 2017. Vol. 8, No. 1, pp: 1-112
- Bela, Gede Bayu Khrisna dan Djinar Setiawina. 2019. Pengaruh PAD, PMDN, Tenaga Kerja Dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota ProvinsiI Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8 [7]:1666 - ISSN: 2303-0178
- Butnaru, Gina Ionela, dan Clara Minut. 2012. Tourism and Regional Development – The Case of Romania. CES Working Papers, pp: 480 – 492
- Caraka, Rezzy Eko. 2019. Pemodelan Regresi Panel pada Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*. Departement of Statistics Diponegoro University. pISSN : 2301 – 8968.
- Chinwoeke, N., Ray, N., and Paschal, N. O. 2014. Impact of Government Expenditure on Nigeria’s Economic Growth (1992-2011). *The Macrotheme Review*, 3(7), 79-87.
- Christian von Luebke (2009) The political economy of local governance: findings from an Indonesian field study. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 45(2) : 201-23.
- Dalamagas, Basil. 2010. Public Sektor and Economic Growth :The Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 2000,32, 277-288.
- Dewi I,S Paulus, Rosalina A.M. Koleangan, Daisy S.M. Engka.2017. Analisi Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Kemiskinan Melalui Belanja Daerah Di Kota Bitung. *E-jurnal Universitas Sam Ratulangi*.
- Diantari, Ni Putu dan I G A P Wirathi. 2017. Pengaruh Investasi Swasta Dan Investasi Pemerintah Melalui Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 6[4]: 472-498 ISSN: 2303-0178.
- Hariwan, Peggy; Swaninggrum, Ayu. Analisis Indeks Pembangunan Manusia Pada 5 Wilayah Hasil Pemekaran Di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], nov. 2015. ISSN 2303-0186.
- Kusuma, Hendra. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9 (1): 1-11. Vol. 9 no. 1.
- Kotambunan, Lavenia, Sutomo Wim Palar, dan Richard L.H Tumilaar. 2016. Analysis Effect Of Capital Expenditure And Human Development Index (Hdi) On Poverty In North Sulawesi (In Years 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah*. 16(1). Halaman: 925-933.

- Muhammad Ibnu, Astrid Offermans & Pieter Glasbergen, 2018 Certification and Farmer Organisation: Indonesian Smallholder Perceptions of Benefits. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 29 (3) : 69-94.
- Natasha Hamilton-Hart & Günther G. Schulze (2016) Taxing Times in Indonesia: The Challenge of Restoring Competitiveness and the Search for Fiscal Space, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 52(3) : 265-295.
- Nehru, Vikram. 2013. Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49 (2), pp.139-166.
- Nurkse, Ragnar. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. New York: Oxford University Press 1953.
- Nworji, I. D., Okwu, A. T., Tomothy C, O., and Nworji. L. O. 2012. Effects of Publik Expenditure on Economic Growth in Nigeria: A Disaggregated Time Series Analysis. *International Journal of Management Science and Business Research*. 1(7). Hal: 1-15.
- Pratama, I Gusti Ngurah Putu Teguh dan I Negah Kartika. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan SiLPA Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 6 [11] : 2228-2263 ISSN : 2303-0178.
- Raden Pardede and Shirin Zahro. 2017. Saving not Spending: Indonesia's Domestic Demand Problem, *Bulletin of Indonesian Economic Studies (BIES)*.
- rintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*. 4(1).
- Rustariyuni, Surya Dewi. 2014. Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan Per Kapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Priode 2004-2012. *PIRAMIDA S.l.*, v. 10, n. 1, july 2014. ISSN 2685-788X. Fakultas Universitas Udayana.
- Salih, Mohame Abdel Rahman. 2012. The Relationship Between Economic Growth and Government Expenditure: Evidance from Sunda. *International Business Research*. 5(8). Hal: 40-46.
- Samputra, Palupi Lindiasari dan Adis Imam Munandar. 2019. Korupsi, Indikator Makro Ekonomi, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT)*. Pengajar Program Ketahanan Nasional, SKSG UI. pISSN : 2301 – 8968.
- Silvia, I.D., dan Sumarto, S. 2014. Does Economic Growth Really Benefit the Poor? Income Distribution Dynamics and Pro-Poor Growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 50(2). pp: 227-242.
- Sri Budhi, Made Kembar. Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], feb. 2013. ISSN 2303-0186.
- Wardani, Putu Ratih Oka dan I Ketut Sutrisna, 2019. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan IPM Di Kawasan Metropolitan Sarbagita. *E-Jurnal EP Unud*, 8 [6]: 1361-1389 ISSN: 2303-0178.